

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah - masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini terjadi karena angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan domestik dan nasional bruto kurang peka dalam mengungkapkan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Apalagi ditambah kenyataan bahwa jurang perbedaan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut (Arsyad, 2010).

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah sebagai subjek dan juga objek

pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Demikian sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembangunan suatu negara harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan penduduknya sehingga seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Maka pembangunan suatu negara dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2009 tercatat masih

cukup besar yakni, sekitar 32,5 juta jiwa atau lebih kurang 14,2 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemiskinan masih merupakan tantangan berat bagi Indonesia. Menurutnya, salah satu kekurangan dalam memerangi hal tersebut adalah materi (sarana produksi) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saat ini belum diberikan secara baik oleh pemerintah. Pendapat senada dikemukakan oleh *Forum on Indonesia Development* (INFID) mengatakan bahwa pemerintah gagal mengatasi kemiskinan, realitas meningkatnya jumlah kaum fakir miskin menunjukkan bahwa program, kebijakan, dan pembangunan selama ini terbukti gagal mengatasi kemiskinan.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Arsyad, 1999), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Pemerintah mengklaim jumlah penduduk miskin terus berkurang. Data terakhir Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin turun sejuta orang menjadi 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari jumlah

penduduk. Penurunan jumlah penduduk miskin ini sangat kontras dengan potret orang miskin yang terjadi di kota dan desa, sebagai contoh potret kehidupan masyarakat miskin yang ada di Jakarta, kemiskinan Suku Laut di Kepulauan Riau dan bagaimana keterbelakangan dan kemiskinan yang terjadi wilayah Indonesia bagian Timur seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua akhirnya menjadi statistik belaka. Produk Domestik Bruto Indonesia pada saat yang sama tahun 2011 juga tumbuh 6,9 persen dan terjadi di semua sektor dibandingkan tahun 2010. Namun di sisi lain, peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia justru merosot dari posisi ke-108 menjadi ke-124.

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi dipulau Jawa sebesar lebih dari 50%, dimana provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persentase tingkat kemiskinan absolutnya paling tinggi se-Jawa dalam beberapa tahun belakangan ini. Masih tingginya rata-rata tingkat kemiskinan absolut di Jawa Tengah yang berada pada level 20,02% dimana hal tersebut masih tergolong *Hard Core Poverty* ($>10\%$) dalam artian tingkat kemiskinan masih berada pada level yang tinggi. Kemudian hampir sekitar 50% kabupaten / kota di Jawa Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan absolut $> 20\%$. Dalam kurun waktu tahun 2005-2009 tingkat kemiskinan absolut di Jawa Tengah telah mengalami

penurunan tetapi masih berada dalam kategori tinggi sebesar 17,72% ditahun 2009 dan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan absolut 5 tahun sebesar 20,02%.

Adanya target tingkat kemiskinan absolut tahun 2013 yang dicanangkan Bappeda sebesar 13,27% dan kesepakatan Millennium Development Goals (MDG's) atau dalam bahasa indonesia diterjemahkan menjadi **“Tujuan Pembangunan Milenium”**, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Pada tahun 2015 dimana tingkat kemiskinan absolut harus berada pada level dibawah 10%. Guna pencapaian target tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah haruslah berusaha lebih keras. Analisis lebih mendalam mengenai masalah kemiskinan di Jawa Tengah sangat diperlukan guna mencari faktor penyebab mengenai masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah.

Pembangunan ekonomi yang semenjak masa sentralistik terpusat di Pulau Jawa tidak meluputkan Jawa dari masalah kemiskinan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Garis Kemiskinan di lihat dari Tabel. 1.1

Tabel 1.1

**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
(000orang)
di Provinsi Jawa Tengah Bulan Maret Tahun 2010 – 2014**

| Tahun | Jumlah Kemiskinan (000 orang/tahun) |
|--------------|---|
| (1) | (2) |
| 2010 | 5217,2 |
| 2011 | 5 256 |
| 2012 | 4 863 |
| 2013 | 4811,3 |
| 2014 | 4 561,8 |

Sumber :Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2002-2009

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa secara total persentase Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan Jawa Tengah masih jauh dari angka yang diharapkan dimana angka kemiskinan masih tinggi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di muka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Angka Tenaga Kerja Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun tetapi ternyata kurang memberikan dampak terhadap Begitu juga halnya dengan pertumbuhan sektor keuangan yang terjadi tetapi perkembangan ini tidak membawa perubahan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain menganalisis:

1. Perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Pengaruh Tingkat pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.
2. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan.
3. Manfaat praktis dapat memberikan informasi dalam memahami pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Tenaga Kerja, sehingga dapat berguna sebagai bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis panel data. Data panel adalah gabungan dari data *cross section* dan *time series* dengan data tahunan dari tahun 2014 – 2017. Data yang digunakan meliputi produk domestik regional bruto (PDRB). Data dalam penelitian ini diambil dari

berbagai sumber seperti laporan tahunan BI, Propinsi dalam angka, Statistik Perbankan Indonesia (SPI), dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dan SEKDA (Statistik Ekonomi Keuangan Daerah). Model ekonometri yang dipergunakan adalah model yang dirumuskan oleh Levine (2000) direplikasi dari Baroroh Utami (2012) “*Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional diwilayah Jawa*” :

$$Growth_i = \beta_0 + \beta_1 (finance)_i + \beta_2 (Conditioning\ set)_i + e_t \quad (3.1)$$

Sehingga bentuk model yang akan digunakan adalah :

$$G_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_t \quad (3.2)$$

Dimana :

$G_{i,t}$ = Kemiskinan

β_0 = konstanta

β = koefisien regresi

β_1 = Koefisien Regresi Pertumbuhan Ekonomi

β_2 = Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan

β_3 = Koefisien Regresi Angka Tenaga Kerja

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Ketenagakerjaan

e_t = *error term*

Banyaknya unit waktu di setiap unit individu inilah yang mencirikan apakah data panel tersebut seimbang atau tidak. Jika tiap-tiap unit individu diobservasi dalam waktu yang sama maka data panel dikatakan

seimbang (*balanced panel data*). Sedangkan jika tidak semua unit individu diobservasi pada waktu yang sama atau bisa juga disebabkan adanya data yang hilang dalam suatu unit individu, maka data panel dikatakan tidak seimbang (*unbalanced panel data*).

F. Sistematikan Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisis tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, penelitian terdahulu, pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan angka

tenaga kerja terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2012-2014 serta dilengkapi dengan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN